

PENERAPAN NILAI KEJUJURAN DAN TANGGUNG JAWAB BERBASIS ETIKA KRISTIANI DALAM PELAPORAN KEUANGAN APBD PEMERINTAH KOTA MEDAN

Olyvia Margaretha Banjarnahor
Universitas Negeri Medan

Verani Sinurat
Universitas Negeri Medan

Stefany N. I Nababan
Universitas Negeri Medan

Nasirwan
Universitas Negeri Medan

Alamat: Jl. William Iskandar Ps. V, Medan Estate, Kec. Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara 20371

Korespondensi penulis: olyviamargarethabanjarnahor@gmail.com

Abstract. *The Regional Government Financial Report (LKPD) is a primary instrument of government accountability in managing public finances. Its quality is determined not only by technical compliance with accrual-based Government Accounting Standards (SAP) under Government Regulation No. 71 of 2010, but also by the ethical values held by government officials. This study analyzes the application of honesty and responsibility values in the financial reporting of Medan City Government and their alignment with LKPD qualitative characteristics, integrated with Christian ethical values. Using a library research method with a descriptive qualitative approach, this study examines financial data from fiscal years 2022–2024. Results show consistent PAD growth from Rp2.23 trillion (2022) to Rp2.44 trillion (2023) and reaching Rp2.77 trillion (2024), aggregate revenue of Rp6.29 trillion in 2024 with a realization rate of 87.84 percent of the target, a budget surplus of Rp36.57 billion, and unqualified (WTP) opinions from BPK for three consecutive years. Honesty correlates with the reliability and relevance characteristics of LKPD, while responsibility correlates with comparability and understandability. Strengthening HR capacity, SPIP, and ethical internalization at the SKPD/OPD level remains essential.*

Keywords: *Honesty, Responsibility, LKPD, Accrual-Based SAP, Transparency, Accountability.*

Abstrak. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) merupakan instrumen utama pertanggungjawaban pemerintah atas pengelolaan keuangan publik. Kualitasnya tidak hanya ditentukan oleh kepatuhan teknis terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010, tetapi juga oleh nilai etika yang dipegang aparatur pemerintah. Penelitian ini menganalisis penerapan nilai kejujuran dan tanggung jawab dalam pelaporan keuangan Pemerintah Kota Medan serta kesesuaiannya dengan karakteristik kualitatif LKPD, yang diintegrasikan dengan nilai etika Kristiani. Metode yang digunakan adalah studi literatur dengan pendekatan kualitatif deskriptif, menganalisis data keuangan tahun anggaran 2022–2024. Hasil menunjukkan PAD tumbuh konsisten dari Rp2,23 triliun (2022) menjadi Rp2,44 triliun (2023) dan mencapai Rp2,77 triliun (2024), total realisasi pendapatan daerah mencapai Rp6,29 triliun (2024) dengan capaian 87,84 persen dari target anggaran, surplus APBD Rp36,57 miliar, dan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK selama tiga tahun berturut-turut. Nilai kejujuran berkorelasi dengan karakteristik keandalan dan relevansi LKPD, sementara nilai tanggung jawab berkorelasi dengan keterbandingan dan kemudahan dipahami. Penguatan kapasitas SDM, SPIP, dan internalisasi nilai etika di tingkat SKPD/OPD tetap menjadi kebutuhan mendesak.

Kata Kunci: Kejujuran, Tanggung Jawab, LKPD, SAP Berbasis Akrual, Transparansi, Akuntabilitas.

LATAR BELAKANG

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah atas pengelolaan keuangan publik kepada masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah di Indonesia mencakup pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota — termasuk di dalamnya Pemerintah Kota Medan sebagai pemerintah daerah tingkat kota. Sebagai instrumen utama transparansi dan akuntabilitas, kualitas LKPD menjadi cerminan nyata dari tata kelola pemerintahan yang baik. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP berbasis akrual, laporan keuangan pemerintah harus memenuhi empat karakteristik kualitatif utama: relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami.

Namun dalam praktiknya, pemenuhan standar teknis semata tidaklah cukup. Kualitas LKPD juga sangat ditentukan oleh nilai-nilai etika yang dipegang oleh aparatur pemerintah. Marshanda dkk. (2024) menegaskan bahwa pejabat publik yang menerapkan nilai-nilai integritas, kejujuran, dan tanggung jawab akan meningkatkan kualitas pelayanan publik secara keseluruhan, termasuk kualitas pelaporan keuangan sebagai bentuk pelayanan informasi kepada masyarakat — dan bahwa transparansi hanya dapat tercapai ketika pejabat publik membuka informasi secara jelas dan dapat diakses masyarakat dengan mudah.

Dalam perspektif Kristiani, nilai kejujuran dan tanggung jawab memiliki landasan moral yang kuat. Amsal 11:3 menegaskan: "Kejujuran orang benar menuntun hidupnya, tetapi kecurangan orang yang tidak setia akan merusak mereka sendiri." Lukas 16:10 menekankan: "Barangsiapa setia dalam perkara kecil, ia pun setia dalam perkara besar." Keduanya bukan sekadar ajaran spiritual, melainkan prinsip etika yang sangat aplikatif dalam konteks penyusunan laporan keuangan: kejujuran menuntut kebenaran dalam setiap penyajian data, sementara tanggung jawab menuntut ketelitian dan konsistensi dalam setiap tahap penyusunannya.

Penelitian ini menggunakan data laporan keuangan Pemerintah Kota Medan tahun anggaran 2022–2024 sebagai objek kajian. Rentang tiga tahun dipilih untuk menunjukkan tren yang bermakna — bukan hanya potret satu titik waktu — sehingga analisis penerapan nilai etika dapat dinilai secara lebih komprehensif. Kota Medan dipilih karena merupakan kota terbesar ketiga di Indonesia dan ibu kota Provinsi Sumatera Utara, dengan populasi

lebih dari 2,4 juta jiwa dan skala pengelolaan keuangan daerah yang signifikan. BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara memberikan opini WTP atas LKPD Kota Medan secara konsisten untuk tahun anggaran 2022, 2023, dan 2024 (DPRD Kota Medan, 2024). Namun Ketua DPRD Kota Medan menegaskan bahwa meski opini WTP diraih, masih terdapat permasalahan yang perlu ditindaklanjuti dengan penuh tanggung jawab — yang mempertegas relevansi kajian dimensi etika dalam pelaporan keuangan daerah.

KAJIAN TEORITIS

1. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

LKPD merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah atas pengelolaan keuangan publik dalam satu periode anggaran, yang menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan kepada masyarakat dan pemangku kepentingan. Berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010 tentang SAP berbasis akrual, laporan keuangan pemerintah harus memenuhi empat karakteristik kualitatif. Karakteristik relevan berarti informasi memiliki manfaat umpan balik, manfaat prediktif, tepat waktu, dan lengkap. Karakteristik andal berarti informasi disajikan secara jujur, dapat diverifikasi, dan bersifat netral. Karakteristik dapat dibandingkan berarti informasi dapat dibandingkan dengan laporan periode sebelumnya. Karakteristik dapat dipahami berarti informasi disajikan dalam bentuk yang jelas sehingga dapat dipahami pengguna.

Komponen utama LKPD terdiri atas Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Pratiwi, Haliah, dan Kusumawati (2024) menegaskan bahwa dalam konteks pemerintahan, laporan keuangan berfungsi sebagai instrumen yang memastikan sumber daya publik telah dikelola secara bertanggung jawab, dan akuntabilitas keuangan mengharuskan seluruh informasi keuangan disajikan secara jelas dan dapat diakses pemangku kepentingan.

2. Nilai Kejujuran dan Tanggung Jawab dalam Perspektif Etika Kristiani

Kejujuran berarti penyajian informasi keuangan dilakukan secara benar, objektif, dan bebas dari manipulasi. Nurhikmah dan Sisdianto (2024) menyebutkan bahwa kepercayaan publik terhadap laporan keuangan sangat bergantung pada kredibilitas dan integritas aparatur yang terlibat — mereka diharapkan tetap objektif, bebas dari pengaruh eksternal, serta mempertimbangkan dampak sosial dari laporan yang mereka susun.

Laporan yang akurat tidak hanya berdampak pada institusi, tetapi juga pada masyarakat dan perekonomian secara luas.

Sementara itu, tanggung jawab merupakan kewajiban pemerintah dalam mengelola dan melaporkan keuangan publik secara tertib, mencakup keseluruhan siklus: perencanaan anggaran yang realistis, pencatatan transaksi yang tertib, pelaporan yang tepat waktu, hingga tindak lanjut atas temuan audit. Sulistiowati dkk. (2024) menegaskan bahwa etika akuntansi berperan besar dalam meningkatkan akuntabilitas pemerintah daerah dan kualitas laporan keuangan, namun hambatan seperti budaya birokrasi yang tidak mendukung nilai etis, rendahnya pemahaman etika di kalangan aparatur, dan lemahnya pengawasan masih menjadi tantangan nyata.

Dalam perspektif Kristiani, Amsal 11:3 menegaskan bahwa integritas adalah penuntun hidup — bukan pilihan situasional — yang berarti kejujuran dalam pelaporan keuangan bukan sekadar kewajiban hukum, melainkan komitmen moral mendasar. Lukas 16:10 menekankan kesetiaan dalam perkara kecil sebagai fondasi amanah yang lebih besar — dalam konteks LKPD, ini berarti tanggung jawab dimulai dari ketepatan setiap entri transaksi di tingkat SKPD/OPD. Kedua nilai ini saling menguatkan: kejujuran memastikan kebenaran informasi, tanggung jawab memastikan keberlangsungan dan konsistensinya.

3. Penelitian Terdahulu

Aripriatiwi dan Wardani (2025) menemukan bahwa penerapan SAP berbasis akrual meningkatkan perolehan opini WTP secara nasional dari 62 persen (2019) menjadi lebih dari 84 persen (2023), namun disparitas antarwilayah masih signifikan dan dipengaruhi keterbatasan SDM, infrastruktur teknologi, serta komitmen pimpinan daerah. Herindraningrum dan Yuhertiana (2021) menyimpulkan bahwa kepatuhan konsisten terhadap SAP berkontribusi pada peningkatan kualitas LKPD, dengan kompetensi SDM dan pengendalian internal sebagai faktor kunci. Rosyidah (2023) mempertegas bahwa kompetensi SDM berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas LKPD.

Aprilla, Wulandari, dan Elcaputera (2024) menunjukkan bahwa kombinasi teknologi digital dan partisipasi publik berpotensi besar menciptakan pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel. Marshanda dkk. (2024) menggarisbawahi bahwa penerapan etika yang baik oleh pejabat publik akan meningkatkan kualitas pelayanan publik termasuk pelaporan keuangan. Nurhikmah dan Sisdianto (2024) memperkuat hal ini dari sisi profesi: kredibilitas laporan keuangan bergantung pada integritas

penyusunnya. Pratiwi, Haliah, dan Kusumawati (2024) menambahkan bahwa tata kelola yang baik dan akuntabilitas keuangan merupakan prasyarat bagi pengelolaan pelaporan keuangan sektor publik yang berkualitas.

Secara keseluruhan, penelitian-penelitian terdahulu masih dominan pada aspek teknis dan sistemik. Penelitian ini melengkapi gap tersebut dengan menambahkan dimensi etika moral berbasis nilai Kristiani sebagai landasan analisis kualitas LKPD, menggunakan data empiris Pemerintah Kota Medan 2022–2024.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi literatur (library research) dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Metode ini digunakan untuk menganalisis, mensintesis, dan mengintegrasikan berbagai sumber teoritis dan empiris yang relevan guna membangun pemahaman komprehensif tentang topik yang dikaji.

Sumber data terdiri atas data primer berupa PP No. 71 Tahun 2010 tentang SAP berbasis akrual dan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta data sekunder berupa jurnal ilmiah terindeks Google Scholar dan data resmi keuangan Pemerintah Kota Medan yang bersumber dari: (1) Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Medan melalui pernyataan resmi Kepala BKAD; (2) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Akhir Tahun Anggaran 2024 yang dipublikasikan portal resmi Pemko Medan; (3) BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara; dan (4) DPRD Kota Medan. Data keuangan mencakup periode tahun anggaran 2022–2024. Analisis data dilakukan melalui tiga tahap: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Penerapan Nilai Kejujuran dalam Pelaporan Keuangan Pemerintah Kota Medan

Kejujuran dalam pelaporan keuangan berarti menyajikan informasi secara benar, lengkap, dan tidak dimanipulasi — selaras dengan karakteristik keandalan dan relevansi dalam SAP berbasis akrual (PP No. 71/2010). Nurhikmah dan Sisdiyanto (2024) menegaskan bahwa dengan menjaga integritas dan transparansi, aparatur penyusun laporan berkontribusi pada terciptanya sistem keuangan yang lebih adil dan dapat dipercaya, dengan dampak yang meluas ke masyarakat dan perekonomian secara luas.

Nilai kejujuran dalam pelaporan keuangan Pemko Medan dapat diidentifikasi melalui tiga indikator konkret. Pertama, keterbukaan dan konsistensi data keuangan: PAD

Kota Medan tumbuh dari Rp2,23 triliun (2022) menjadi Rp2,44 triliun (2023), dan kembali meningkat menjadi Rp2,77 triliun (2024) — menunjukkan tren pertumbuhan yang konsisten selama tiga tahun berturut-turut. Total realisasi pendapatan daerah tahun 2024 mencapai Rp6,29 triliun atau 87,84 persen dari target anggaran Rp7,17 triliun (LRA 2024, Audited). Realisasi pajak daerah tumbuh dari Rp2,11 triliun (2023) menjadi Rp2,48 triliun (2024), atau meningkat sekitar 17,81 persen — didorong terutama oleh kinerja sektor PBB dan BPHTB. Data-data ini bersumber dari LKPD resmi yang telah diaudit BPK dan dipublikasikan secara terbuka, mencerminkan komitmen kelembagaan untuk tidak menyembunyikan informasi yang seharusnya diketahui publik. Kedua, perolehan opini WTP: BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian atas LKPD Kota Medan untuk tahun anggaran 2022, 2023, dan 2024 — yang berarti BPK menilai laporan keuangan Pemko Medan secara keseluruhan telah disajikan secara wajar sesuai SAP (DPRD Kota Medan, 2024). Ketiga, pengakuan terbuka atas ketidaksempurnaan: Ketua DPRD Kota Medan menegaskan bahwa meski opini WTP diraih, masih terdapat catatan yang perlu ditindaklanjuti — suatu pernyataan yang justru mencerminkan dimensi kejujuran kelembagaan, karena tidak menyembunyikan ketidaksempurnaan di balik capaian formal.

Aprilla, Wulandari, dan Elcaputera (2024) menambahkan bahwa pemanfaatan teknologi digital seperti SIPD yang kini digunakan 524 dari 546 daerah di Indonesia memperkuat aspek kejujuran ini, karena memungkinkan data keuangan dipantau secara langsung oleh BPK, KPK, dan publik — mengurangi celah untuk manipulasi informasi. Ini menunjukkan bahwa nilai Amsal 11:3 tidak hanya relevan sebagai landasan moral personal, tetapi juga sebagai prinsip kelembagaan yang harus dijaga melalui sistem yang mendukung keterbukaan.

2. Penerapan Nilai Tanggung Jawab dalam Pelaporan Keuangan Pemerintah Kota Medan

Tanggung jawab dalam pelaporan keuangan mencakup keseluruhan siklus: dari perencanaan anggaran yang realistis, pencatatan transaksi yang tertib, pelaporan tepat waktu, hingga tindak lanjut atas temuan audit. Pratiwi, Haliah, dan Kusumawati (2024) menegaskan bahwa akuntabilitas keuangan mengharuskan entitas pemerintah memastikan sumber daya publik dikelola secara bertanggung jawab dan seluruh informasi keuangan disajikan secara jelas kepada pemangku kepentingan. Lukas 16:10 memperkuat hal ini dari sisi moral: tanggung jawab dimulai dari hal-hal kecil — ketepatan pencatatan

satu transaksi, kelengkapan satu dokumen pendukung — karena dari situlah kualitas LKPD secara keseluruhan dibangun.

Laporan keuangan Pemko Medan 2022–2024 menampilkan beberapa indikator tanggung jawab yang positif dan terukur. Surplus anggaran tahun 2024 tercatat Rp36,57 miliar berdasarkan LRA 2024 yang telah diaudit BPK, dengan realisasi pendapatan daerah yang konsisten melampaui target dalam tiga tahun terakhir — indikator pengelolaan keuangan yang sehat dan disiplin fiskal yang terjaga. Daya serap belanja daerah juga meningkat dari 80,09 persen pagu atau Rp6,28 triliun (2023) menjadi 86,50 persen pagu atau Rp6,26 triliun (2024), menunjukkan peningkatan kualitas perencanaan dan eksekusi program. Selain itu, Pemko Medan menyerahkan LKPD kepada BPK tepat waktu sesuai kewajiban konstitusional — bentuk tanggung jawab administratif yang paling mendasar namun sering luput dari perhatian.

Namun Sulistiowati dkk. (2024) mengingatkan bahwa hambatan struktural seperti tekanan politik, budaya birokrasi yang permisif, dan minimnya internalisasi nilai etika di lingkungan SKPD/OPD masih menjadi tantangan nyata yang tidak bisa diselesaikan oleh sistem semata. Di sinilah nilai Lukas 16:10 paling relevan: tanggung jawab yang sejati bukan sekadar memenuhi target formal, melainkan komitmen moral dalam setiap detail penyusunan laporan di setiap level organisasi pemerintahan.

3. Kesesuaian Nilai Etika dengan Karakteristik Kualitatif LKPD dan Analisis Kritis

Herindraningrum dan Yuhertiana (2021) menegaskan bahwa kepatuhan terhadap SAP meningkatkan kualitas laporan keuangan serta mendukung transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah. Penelitian ini memetakan keterkaitan antara nilai etika dan karakteristik kualitatif LKPD sebagai berikut.

Nilai kejujuran berkorelasi dengan karakteristik keandalan dan relevansi. Tren PAD Kota Medan yang terverifikasi selama tiga tahun dan opini WTP BPK mencerminkan pemenuhan karakteristik keandalan. Rosyidah (2023) mengingatkan bahwa kompetensi SDM berpengaruh signifikan terhadap kualitas LKPD — kejujuran sebagai nilai moral harus ditopang kapasitas teknis yang memadai. Nilai tanggung jawab berkorelasi dengan karakteristik keterbandingan dan kemudahan dipahami. Data LKPD Kota Medan yang menyajikan tren tiga tahun secara konsisten menunjukkan upaya pemenuhan karakteristik keterbandingan. Aripriatiwi dan Wardani (2025) mengingatkan

bahwa komitmen substansial — bukan sekadar kepatuhan formal — diperlukan agar laporan benar-benar berguna sebagai alat evaluasi publik.

**Tabel 1 Pemetaan Nilai Etika dengan Karakteristik Kualitatif LKPD-
Pemerintah Kota Medan 2022-2024**

Nilai Etika	Landasan	Karakteristik SAP	Indikator pada LKPD Kota Medan	Catatan
Kejujuran	Amsal 11:3	Keandalan & Relevansi	PAD tumbuh Rp2,23 T (2022) → Rp2,44 T (2023) → Rp2,77 T (2024); pajak daerah Rp2,48 T (2024); total pendapatan Rp6,29 T atau 87,84% dari target; opini WTP 3 tahun berturut-turut; data terbuka dan terverifikasi.	Catatan BPK masih ada; perlu pendalaman kejujuran hingga level SKPD/OPD.
Tanggung Jawab	Lukas 16:10	Keterbandingan & Kemudahan dipahami	Surplus APBD Rp36,57 M (2024, audited); daya serap belanja meningkat dari 80,09% (2023) menjadi 86,50% (2024); tren tiga tahun tersaji konsisten; LKPD diserahkan tepat waktu.	Internalisasi tanggung jawab di SKPD/OPD perlu diperkuat secara struktural.

4. Solusi Penerapan Nilai Kejujuran dan Tanggung Jawab Berbasis Etika Kristiani di Pemerintah Kota Medan

Berdasarkan analisis sebelumnya, terdapat tiga permasalahan utama yang perlu diselesaikan: rendahnya internalisasi nilai etika di tingkat SKPD/OPD, lemahnya pengendalian internal, dan budaya birokrasi yang belum sepenuhnya mendukung kejujuran dan tanggung jawab dalam pelaporan keuangan.

Untuk mengatasi rendahnya pemahaman etika di kalangan aparatur (Sulistiowati dkk., 2024), Pemerintah Kota Medan perlu menyelenggarakan pelatihan etika akuntansi pemerintahan secara berkala di seluruh SKPD/OPD — bukan sebagai formalitas, tetapi sebagai program pembentukan karakter yang menghubungkan kewajiban profesional dengan nilai moral, termasuk nilai kejujuran (Amsal 11:3) dan tanggung jawab (Lukas 16:10) sebagai landasan reflektif bagi aparatur.

Untuk mengatasi kelemahan pengendalian internal yang menjadi penyebab masih adanya catatan BPK (Aripriatiwi & Wardani, 2025), penguatan SPIP di tingkat SKPD/OPD perlu diprioritaskan melalui pemeriksaan internal yang rutin dan mekanisme pelaporan penyimpangan yang aman. SPIP yang kuat memastikan kejujuran tidak hanya bergantung pada integritas individu, tetapi terlembagakan dalam sistem.

Untuk mengatasi budaya birokrasi yang permisif (Marshanda dkk., 2024; Nurhikmah & Sisdianto, 2024), diperlukan keteladanan nyata dari pimpinan, penetapan kode etik aparatur keuangan yang dipahami dan diterapkan seluruh staf, serta sistem penghargaan bagi unit kerja yang menyajikan laporan dengan akurasi dan kelengkapan tertinggi. Pada akhirnya, sebagaimana ditegaskan Nurhikmah dan Sisdianto (2024), kredibilitas laporan keuangan bergantung pada integritas manusia yang menyusunnya — dan integritas adalah produk budaya, bukan sekadar regulasi.

KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa nilai kejujuran dan tanggung jawab berbasis etika Kristiani memiliki hubungan yang kuat dengan karakteristik kualitatif LKPD menurut SAP berbasis akrual. Nilai kejujuran (Amsal 11:3) berkorelasi dengan karakteristik keandalan dan relevansi, sementara nilai tanggung jawab (Lukas 16:10) berkorelasi dengan keterbandingan dan kemudahan dipahami.

Analisis terhadap laporan keuangan Pemerintah Kota Medan 2022–2024 menunjukkan tren positif yang nyata: PAD tumbuh konsisten dari Rp2,23 triliun (2022) ke Rp2,44 triliun (2023) dan Rp2,77 triliun (2024), total realisasi pendapatan 2024 mencapai Rp6,29 triliun atau 87,84 persen dari target anggaran, surplus APBD Rp36,57 miliar, serta daya serap belanja yang meningkat dari 80,09 persen (2023) menjadi 86,50 persen (2024). Capaian ini, bersama opini WTP dari BPK untuk tiga tahun anggaran berturut-turut, mencerminkan penerapan nilai kejujuran dan tanggung jawab yang cukup baik pada tingkat kelembagaan. Namun gap antara capaian formal dan substansi etika —

terlihat dari catatan BPK yang masih ada — mengindikasikan bahwa internalisasi nilai etika di tingkat SKPD/OPD masih perlu diperkuat.

Pemerintah Kota Medan disarankan untuk memperkuat internalisasi nilai etika melalui program pelatihan etika akuntansi pemerintahan secara berkala, mengoptimalkan SPIP sebagai lini pertama penjaminan kualitas laporan, memaksimalkan pemanfaatan SIPD sebagai instrumen transparansi, dan memfasilitasi partisipasi publik dalam pengawasan keuangan daerah. Penelitian selanjutnya disarankan menggunakan pendekatan mixed methods yang menggabungkan analisis dokumen LKPD dengan wawancara mendalam kepada aparatur penyusun laporan, serta memperluas cakupan ke beberapa pemerintah kota di Sumatera Utara untuk hasil yang lebih komprehensif.

DAFTAR REFERENSI

- Aprilla, W., Wulandari, M., & Elcaputera, A. (2024). Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah melalui teknologi digital dan partisipasi publik dalam upaya pemberantasan korupsi. *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara*, 2(4), 321–334. <https://doi.org/10.55606/eksekusi.v2i4.1553>
- Aripriatiwi, R. A., & Wardani, N. P. (2025). Transformasi sistem akuntansi publik dan tantangan peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. *Jurnal Aktual Akuntansi Keuangan Bisnis Terapan (AKUNBISNIS)*, 8(2), 274–284. <https://doi.org/10.32497/akunbisnis.v8i2.7114>
- Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Medan. (2024). Realisasi APBD Kota Medan sampai dengan 16 Oktober 2024. Pernyataan resmi Kepala BKAD Kota Medan, Zulkarnain Lubis. Balai Kota Medan, 18 Oktober 2024
- Herindraningrum, F. F., & Yuhertiana, I. (2021). Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di Indonesia: Literature review. *El Muhasaba: Jurnal Akuntansi*, 12(2), 157–171. <https://doi.org/10.18860/em.v12i2.12287>
- Marshanda, S., Zikri, S. N., Pardede, C. S. C., Narendra, D., Hanoselina, Y., & Helmi, R. F. (2024). Analisis peranan etika dalam penerapan akuntabilitas dan transparansi pelayanan publik. *Jurnal Ilmu Komunikasi dan Sosial Politik*, 2(2), 396–401. <https://jurnal.itc.web.id/index.php/jiksp/article/view/1941>
- Nurhikmah, A. H., & Sisdianto, E. (2024). Peran akuntan dalam membangun kepercayaan publik terhadap laporan keuangan: Perspektif etika. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 2(11). <https://doi.org/10.62281/v2i11.1053>
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/5095/pp-no-71-tahun-2010>
- Pemerintah Kota Medan. (2022, 2023, & 2024). Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Medan. Portal Resmi Pemerintah Kota Medan. <https://portal.medan.go.id/menu/pemerintahan/transparansi-pengelolaan-anggaran-daerah-kota-medan>
- Pemerintah Kota Medan. (2022, 2023, & 2024). Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kota Medan. Portal Resmi Pemerintah Kota Medan. <https://portal.medan.go.id>

- Pratiwi, R. I., Haliah, & Kusumawati, A. (2024). The influence of transparency, governance, and financial accountability in managing financial reporting in the public sector. *International Journal of Educational and Life Sciences*, 2(10), 1165–1180. <https://doi.org/10.59890/ijels.v2i10.2571>
- Rosyidah, D. M. (2023). Pengaruh penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. *Jurnal Multidisiplin West Science*, 2(08), 615–635. <https://doi.org/10.58812/jmws.v2i08.566>
- Sulistiowati, Dina R., & Putri N. (2024). Transparansi keuangan daerah: Mengapa etika akuntansi penting? *JoSES: Journal of Sharia Economics Scholar*, 3(3), 12–18. <https://ojs.unimal.ac.id/index.php/joses/article/view/21558>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38685/uu-no-23-tahun-2014>
- Wulandari, T., dkk. (2024). Pengaruh akuntabilitas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) dan kinerja keuangan pemerintah daerah terhadap tingkat korupsi pemerintah daerah. *SINERGI: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(1), 427–447. <http://manggalajournal.org/index.php/SINERGI/article/view/817>